

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO T.A 2010 – 2012

oleh:

Mirki Vici S. Tenda¹

Harijanto Sabijono²

Victorina Z. Tirayoh³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi, Manado.

email: ¹ mirkivicitenda@yahoo.com

² h_sabijono@yahoo.com

³ vtirayoh@yahoo.com

ABSTRAK

Kepala daerah dalam melaksanakan penganggaran harus mengikuti pedoman tentang standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan daerah, Pemerintah daerah harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Menyusun anggaran belanja daerah diusulkan dan ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara, daerah lebih bebas dan leluasa dalam pengelolaan keuangannya maka pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja daerah pada pemerintah kota manado. menyusun anggaran belanja daerah diusulkan dan harus ada persetujuan dari DPRD. Selanjutnya dibuat pertanggung jawaban dalam laporan realisasi anggaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mempelajari belanja daerah yang diterapkan membandingkan dengan teori dan literatur lainnya. Pemerintah Kota Manado melalui Badan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) membuat laporan anggaran belanja daerah dan di tuliskan dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan, khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja ifrastruktur, jalan dan irigasi. Surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi. Sebaiknya kepala daerah meningkatkan efektifitas dari realisasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dikelolanya.

Kata kunci: *belanja daerah, realisasi anggaran, pemerintah kota*

ABSTRACT

Regional head must follow guideline about governmental accounting standard and regional financial standard. For this reason, all regional government must arrange regional budget for revenue and spending and this research aims to figure out regional spending at manado city government. In analysis regional spending budget, it is proposed and it is must to have settlement from house of representatives. Constructing the proposed state budget and approval of regional representatives council. financial area is basically part of the financial system of the state, regional freer and more flexibility in managing its finances, the government established a policy of fiscal decentralization. evaluation report is made in budget realization report. The employed method is quantitative descriptive analysis, in which by studying the applied regional spending in the field and compared with theory and other literatures. Financial and goods arrangement that is held by manado city government region, Through Manado City Government financial management board and district property reports on state budget and write in the notes to the financial statements. Results did not decrease or increase significantly especially in social assistance spending, grant expenditures, and expenditures ifrastruktur, roads and irrigation. and said to be surplus, because the budget received is greater than the actual budget. Should improve the effectiveness of regional heads regional budget realization so as to boost the financial performance of the management.

Keywords: *regional budget spending, budget realization report, city government*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Prinsip keadilan mewajibkan belanja daerah dialokasikan kepada penyediaan layanan umum yang adil dan merata supaya dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat. Keadaan ini hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah mempunyai standar pelayanan minimal untuk masyarakat. Realisasi Anggaran Belanja pemerintah dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara. Agar daerah lebih bebas dan leluasa dalam pengelolaan keuangannya maka pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Realisasi Anggaran Belanja merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, secara umum Realisasi anggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program aktifitas dalam satuan moneter.

Formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Pemerintah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban - kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa biaya atau tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara di bebaskan kepada negara apabila diwajibkan dalam perundang-undangan. Biaya/tarif pelayanan publik selain diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Melihat hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010 – 2012.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010 – 2012 khususnya belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja infrastruktur jalan, dan irigasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Hariadi, dkk (2010:132) menyatakan bahwa, akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Informasi yang dihasilkan adalah berupa laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan yang memadai. Nordiawan dan Hertianti (2010:20) sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai pelaporan keuangan.

Sistem Akuntansi SKPD

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan ketentuan pasal 96 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hariadi, dkk (2010:133)

satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi pendapatan, belanja, dan asset.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Halim (2007:20) Pasal 64 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1974, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengelolaan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek – proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu.

Konsep Keuangan Daerah

Halim dan Kusufi (2012:43) menyatakan akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (Keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, kota atau Provinsi). Yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD, Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditor, dan Debitur. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Pada organisasi pemerintah daerah, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 serta Pasal 81 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan lampiran XXIX butir (II) dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Hariadi,dkk (2010:4) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan keuangan daerah yang dipisahkan. APBD dan barang atau kekayaan milik daerah merupakan kekayaan daerah yang dikelola langsung, sedangkan BUMD merupakan suatu contoh keuangan daerah yang dipisahkan.

Anggaran

Hariadi, dkk (2010:7) menyatakan anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nordiawan dan Hertianti (2010:69) menyatakan anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Definisi belanja Daerah

PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Klasifikasi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. **Belanja Operasi.**
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek.
2. **Belanja Modal.**
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
3. **Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.**
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. **Belanja Transfer.**
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Tanjung (2009:6) belanja pemerintah daerah terbagi atas kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung pada pasal 36 ayat 1,2,dan 3.

Analisis Standard Belanja

Dalam PP No.58/2005 Pasal 38 ayat 2 menyebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. (Tampubolon,dkk 2013 : 92)

Penelitian Terdahulu

1. Wehantouw (2011) dengan judul: Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah kota manado telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dan menganalisis apakah pendapatan dan belanja kota manado telah terlaksanakan secara efisien dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan pengukuran variable. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu kinerja pemerintah daerah untuk pengeluaran tidak efisien di karenakan kinerja keuangan daerah pada tahun 2009 di posisi > 100 % yaitu tidak efisien pendapatan hampir saja mencapai target yang di tetapkan tingkat efektifitas beradadi posisi 90 % - 100% di katakan keuangan daerah yang efektif dibandingkan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang besar disebabkan tidak terjadi program dan kegiatan pemerintah kota manado yang mempengaruhi anggaran belanja daerah. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaannya yaitu objek penelitian di pemerintah kota. Perbedaannya, penulis menganalisis realisasi anggaran belanja daerah sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bachmid (2012) dengan judul: Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado 2006 -2010. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja kota manado telah terlaksanakan secara efisien dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu dibandingkan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang besar disebabkan tidak terjadi program dan kegiatan pemerintah kota manado yang mempengaruhi anggaran belanja daerah. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan penulis.

Persamaanya yaitu objek penelitian dan masalah yang sama yaitu belanja daerah. Perbedaannya, penulis melihat judul dan tahun anggaran yang di analisis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010 – 2012 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Tempat dan waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Manado khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah(BPK – BMD) pada bulan Februari sampai Maret 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
- b. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
- c. Mencari literatur - literatur yang terkait dalam penelitian ini.
- d. Mengumpulkan data - data yang terkait dalam penelitian ini pada Pemerintah kota manado.
- e. Menganalisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010 – 2012.berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.Kuncoro (2009:145) jenis data dapat di bedakan menjadi:

- a. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
- b. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber Data

Kuncoro (2009:148), sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010 - 2012 dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada
- c. Mempelajari data yang diterima dari objek penelitian
- d. Mengolah data yang diterima dari objek penelitian
- e. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada
- f. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran – saran yang dianggap perlu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

- a. Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Total presentase belanja operasi 95,60 % yang terdiri dari, belanja pegawai 98,04%, belanja barang 81,70%, belanja hibah 98,65%, belanja bantuan sosial 92,78%. Total presentase belanja modal 87,40% yang terdiri dari, belanja tanah 93,93%, belanja peralatan mesin 65,42%, belanja bangunan dan gedung 92,80%, belanja jalan, irigasi dan jaringan 94,87%, belanja aset tetap lainnya 62,70%. Total presentase belanja tak terduga sebesar 50,00%. Jadi untuk total belanja tahun anggaran 2010 sebesar 94,32%. Secara khusus realisasi anggaran pemerintah kota Manado mengalami surplus yang berarti bahwa anggaran yang diterima lebih besar dari realisasi belanja yaitu 94,32 %, namun kita melihat belanja operasi lebih besar dari belanja modal sebesar 87,40 % dan belanja tak terduga sebesar 50,00 %, sedangkan belanja operasi yaitu sebesar 95,60 % yang didalamnya mencakup belanja pegawai 98,04 % yang mendominasi. Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial 98,65 % , 92,78 % serta infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan 94,87 %.

Realisasi anggaran belanja daerah pemerintah kota Manado untuk tahun 2011 yang diuraikan sebagai berikut: Total presentase belanja operasi sebesar 95,42% yang terdiri dari, belanja pegawai 96,88%, belanja barang 88,92%, belanja hibah 92,02%, belanja bantuan sosial 88,84 %. Total presentase belanja modal 89,18 % yang terdiri dari, belanja tanah 54,63%, belanja peralatan mesin 80,85%, belanja bangunan dan gedung 90,84% belanja jalan, irigasi dan jaringan 96,32 %, belanja aset tetap lainnya 90,63 %. Total belanja tak terduga sebesar 27,96%. Jadi total presentase belanja tahun 2011 adalah 94,09 %.

Realisasi anggaran belanja pemerintah kota Manado mengalami Surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada realisasi belanja yaitu sebesar 94,09% walaupun belanja operasi di tahun sebelumnya (2010) naik 95,60 % dan tahun 2011 menurun 95,42 % akan tetapi kita bisa melihat anggaran untuk masyarakat khususnya belanja hibah dan bantuan sosial hanya 92,02 %, 88,84% juga menurun dari tahun sebelumnya (2010) 98.65 % , 92,78 % . untuk infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan mengalami kenaikan dari 94.87 % ke 96,32 % dan belanja pegawai turun sebesar 96,88 %.

Tahun 2012 realisasi anggaran belanja daerah pemerintah kota Manado diuraikan sebagai berikut: Total presentase belanja operasi sebesar 92,79 % yang terdiri dari, belanja pegawai 95,68%, belanja barang 82,682%, belanja hibah 63,92%, belanja bantuan sosial 33,12 %, belanja bantuan keuangan 100.00%. Total presentase belanja modal 84,09 % yang terdiri dari, belanja tanah 29,68%, belanja peralatan mesin 91,45%, belanja bangunan dan gedung 87,56% belanja jalan, irigasi dan jaringan 82,79 %, belanja aset tetap lainnya 88,29 %. Total belanja tak terduga sebesar 32,21%. Jadi total presentase belanja tahun 2012 adalah 91,12 %.

Tahun 2012 mengalami surplus untuk belanja daerah kota Manado sebesar 91,12 % karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran yang direalisasikan. sehingga belanja operasi sebesar 92,79 %, belanja pegawai 95,68%, untuk belanja hibah, bantuan sosial dan infrastruktur, jalan dan irigasi, hanya sebesar

63,92 % , 33,12%, 82,79 % sangat menurun dari tahun sebelumnya (2011) yaitu 92,02 % , 88,84 % , 96,32 % dan yang membuat anggaran membengkak di tahun 2012 yaitu belanja bantuan keuangan sebesar 100,00 % .

Pembahasan

Anggaran belanja daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah, pengeluaran yang harus disalurkan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Penulis menganalisis realisasi anggaran belanja daerah pemerintah kota manado apakah telah efektif dan efisien terutama memperhatikan belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja ifrastruktur, jaringan dan irigasi yang sesuai dengan permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan negara.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Manado, yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan belanja daerah dengan komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang proporsional melalui upaya-upaya stabilisasi dan/atau peningkatan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan dan laporan realisasi anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) selama satu periode akuntansi

Hasil Penelitian Wehantouw 2012 mendukung analisis kinerja pemerintah daerah untuk pengeluaran efisien dan pendapatan hampir mencapai efektifitas dan penelitian Bachmid 2012 memperjelas penelitian tahun sebelumnya dimana tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang besar disebabkan tidak terjadinya program atau kegiatan pemerintah kota manado yang mempengaruhi belanja daerah. Hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa realisasi anggaran belanja daerah pemerintah kota Manado terus mengalami peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang baik di buktikan dari opini BPK RI yaitu Wajar Dengan Pengecualian dan tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah :

1. Pemerintah Kota Manado melalui BPK - BMD, Memiliki wewenang mengelola keuangan dan barang – barang milik pemerintah kota.
2. Untuk semua pengelolaan Keuangan Negara di Pemerintah Kota Manado dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Manado tahun 2010, 2011, 2012 tidak terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja ifrastruktur, jalan dan irigasi. dan dikatakan surplus, karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi.
4. Realisasi anggaran pemerintah kota manado sudah efektif dan efisien karena mampu melihat prioritas anggaran terhadap masyarakat.
5. Laporan Keuangan/Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Manadot diukur dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu tolak ukur kinerja keuangan yang berkualitas sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 299 (2), pasal 314. Dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 Pasal 1 dan 16.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pemerintah kota manado melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) yang mendapat opini Wajar Dengan (WDP) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya agar terus mengembangkan penelitian tentang Belanja Daerah sehingga dapat dibandingkan dengan data yang terbaru karena Realisasi Anggaran Belanja Daerah sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama belanja bantuan sosial, belanja Hibah dan Belanja Infrastruktur, Jalan dan Irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK – BMD Kota Manado. 2014. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2012*. Manado
- Bachmid, Farida 2012. *Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado.Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal.69
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan M.Syam.Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Menelitidan Menulis Tesis?Edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Nordiawan Deddi dan Ayunyingtias Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tentang Klasifikasi Belanja Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Pasal 38. Mengenai Penyusunan Anggaran. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. PSAP Nomor 2, Paragraf 7. Tentang Belanja Daerah. Jakarta.
- Tampubolon, Natalia, Ansory Sar, Doddy Hardiana, Thia Jasmania, Nazer, Nur Khusniyah Indrawati, Mursalim, Victor Lengkong dan Tjahjo Winarto. 2013. *Modul Belanja Daerah Kursus Keuangan Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan*. Jakarta
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD*. Bandung.
- Wehantouw,Stefani. 2011. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado. Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal. 73.